

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR: KEP-765/BC/2017

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) PENYAMPAIAN DOKUMEN
PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA
ELEKTRONIK (PDE)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan telah dibuatkan sistem penyampaian dokumen pemberitahuan pabean dengan menggunakan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE);
- b. bahwa pelaksanaan uji coba penyampaian dokumen pemberitahuan pabean pada beberapa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai telah dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Pabean Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 132/BC/2016 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 415/BC/2016 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE).

PERTAMA : Kantor Pabean sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini adalah Kantor Pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE).

KEDUA : Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), rencana kedatangan

sarana pengangkut (RKSP), dan/atau pemberitahuan pabean kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut (*inward/outward manifest*).

- KETIGA : Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat menggunakan teknologi berbasis internet atau lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kementerian Keuangan.
- KEEMPAT : Menetapkan kantor pabean, jenis pemberitahuan pabean, dan waktu penerapan penyampaian dokumen pemberitahuan pabean dalam bentuk elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan teknologi berbasis internet sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Pemberitahuan pabean dalam bentuk elektronik yang disampaikan melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan diktum KEEMPAT merupakan bentuk dokumen yang berlaku secara sah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- KEENAM : Kepala kantor pabean yang ditetapkan untuk melaksanakan penerapan penyampaian pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT wajib :
- a. menyampaikan surat persetujuan kepada pengguna jasa untuk ditandatangani; dan
 - b. mengadministrasikan surat persetujuan yang telah ditandatangani pengguna jasa;
- surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETUJUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini maka Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 132/BC/2016 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 415/BC/2016 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Pabean Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal pemberlakuan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat;
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten;
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta;
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat;

11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah Dan DIY;
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I;
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II;
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara Timur;
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat;
16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan;
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur;
18. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan
19. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara;
20. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku;
21. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua;
22. Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok;
23. Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam;
24. Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe C Soekarno Hatta;
25. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;
26. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang;
27. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda;
28. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak;
29. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
30. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas;

31. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;
32. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung;
33. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar;
34. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta;
35. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Amamapare;
36. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua;
37. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
38. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung;
39. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin;
40. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai;
41. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik;
42. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi;
43. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu;
44. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar;
45. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang;
46. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru;
47. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak;
48. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda;

49. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta;
50. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun;
51. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang;
52. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tarakan;
53. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur;
54. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta;
55. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon;
56. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Babo;
57. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh;
58. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi;
59. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis;
60. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bitung;
61. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro;
62. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang;
63. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap;
64. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon;
65. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong;
66. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo;

67. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang;
68. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura;
69. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
70. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari;
71. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ketapang;
72. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kotabaru;
73. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Tanjung;
74. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe;
75. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Luwuk;
76. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili;
77. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado;
78. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Merauke;
79. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram;
80. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Meulaboh;
81. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Morowali;
82. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau;
83. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan;
84. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalan Bun;

85. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang;
86. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan;
87. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare;
88. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar;
89. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pulang Pisau;
90. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit;
91. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta;
92. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete;
93. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong;
94. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sumbawa;
95. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung;
96. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan; dan
97. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternate.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

-ttt-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BEA DAN CUKAI
 NOMOR KEP-765/BC/2017
 TENTANG
 PENERAPAN SECARA PENUH
 (MANDATORY) PENYAMPAIAN
 DOKUMEN PEMBERITAHUAN
 PABEAN MELALUI SISTEM
 PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK
 (PDE)

KANTOR PABEAN TEMPAT PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM
 BENTUK DATA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK
 (PDE)

No	Kantor Pabean
1	Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok
2	Kantor Pelayanan Utama Tipe C Soekarno Hatta
3	Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam
4	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan
5	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang
6	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda
7	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak
8	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai
9	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas
10	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak
11	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung
12	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar
13	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta
14	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Amamapare
15	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan
16	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung
17	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin
18	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai
19	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik
20	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi
21	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu
22	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar
23	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

No	Kantor Pabean
24	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru
25	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak
26	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda
27	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta
28	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun
29	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang
30	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tarakan
31	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur
32	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
33	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua
34	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon
35	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Babo
36	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh
37	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi
38	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis
39	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bitung
40	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro
41	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang
42	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap
43	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon
44	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong
45	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo
46	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang
47	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura
48	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember
49	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari
50	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ketapang
51	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kotabaru
52	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Tanjung
53	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe

No	Kantor Pabean
54	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Luwuk
55	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili
56	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado
57	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram
58	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Meulaboh
59	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Merauke
60	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Morowali
61	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau
62	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan
63	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalan Bun
64	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang
65	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan
66	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare
67	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar
68	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pulang Pisau
69	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit
70	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta
71	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete
72	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong
73	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sumbawa
74	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung
75	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan
76	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternate

DIREKTUR JENDERAL

-ttt-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BEA DAN CUKAI
 NOMOR KEP-765/BC/2017
 TENTANG
 PENERAPAN SECARA PENUH
 (MANDATORY) PENYAMPAIAN
 DOKUMEN PEMBERITAHUAN
 PABEAN MELALUI SISTEM
 PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK
 (PDE)

KANTOR PABEAN TEMPAT PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM
 BENTUK DATA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK
 (PDE) DENGAN TEKNOLOGI BERBASIS INTERNET

No	Kantor	Jenis Pemberitahuan Pabean	Jadwal Mandatory
1	Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Januari 2018
2	Kantor Pelayanan Utama Tipe C Soekarno Hatta	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Januari 2018
3	Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
4	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Januari 2018
5	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Januari 2018
6	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Januari 2018
7	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Januari 2018
8	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Januari 2018
9	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Januari 2018
10	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Januari 2018
11	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Januari 2018
12	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
13	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Januari 2018

No	Kantor	Jenis Pemberitahuan Pabean	Jadwal Mandatory
14	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Amamapare	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
15	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
16	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Januari 2018
17	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
18	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
19	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
20	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
21	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Januari 2018
22	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
23	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
24	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
25	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
26	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
27	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
28	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
29	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
30	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tarakan	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
31	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
32	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018

No	Kantor	Jenis Pemberitahuan Pabean	Jadwal Mandatory
33	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
34	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
35	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Babo	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
36	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
37	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
38	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
39	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bitung	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
40	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
41	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
42	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
43	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
44	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
45	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
46	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
47	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
48	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
49	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
50	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ketapang	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
51	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kotabaru	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018

No	Kantor	Jenis Pemberitahuan Pabean	Jadwal Mandatory
52	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Tanjung	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
53	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
54	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Luwuk	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
55	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
56	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
57	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
58	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Meulaboh	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
59	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Merauke	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	01 April 2018
60	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Morowali	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
61	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
62	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
63	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalan Bun	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
64	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
65	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
66	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare	- Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	9 Mei 2016
		- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1)	01 Maret 2018
67	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
68	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pulang Pisau	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
69	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
70	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016

No	Kantor	Jenis Pemberitahuan Pabean	Jadwal Mandatory
71	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
72	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016
73	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sumbawa	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
74	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
75	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	19 Oktober 2016
76	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternate	- Pemberitahuan Manifes (BC 1.1) - Pemberitahuan Impor (BC 2.0) - Pemberitahuan Ekspor (BC 3.0)	09 November 2016

DIREKTUR JENDERAL

-ttt-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-765/BC/2017
TENTANG
PENERAPAN SECARA PENUH
(MANDATORY) PENYAMPAIAN
DOKUMEN PEMBERITAHUAN
PABEAN MELALUI SISTEM
PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK
(PDE)

**PERSETUJUAN PENGGUNA LAYANAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN
PABEAN, DOKUMEN CUKAI DAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DALAM
BENTUK DATA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA
ELEKTRONIK (PDE)**

Surat ini merupakan pernyataan setuju oleh pengguna layanan penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan ketentuan sebagai berikut :

DEFINISI

1. *Public Key Infrastructure* adalah sebuah kunci yang bersifat unik untuk menjamin data *integrity* dan *non repudiation* pada dokumen yang ditransaksikan.
2. Pengguna adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE).
3. *Contact Center* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pusat layanan penerimaan dan penyampaian informasi serta penerimaan pengaduan di bidang kepabeanan dan cukai dari dan/atau kepada pengguna layanan melalui saluran komunikasi DJBC.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

1. Pada penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE)
 - a. *Public key infrastructure* digunakan untuk menjamin data *integrity* dan *non repudiation* pada dokumen yang ditransaksikan.
 - b. Pengguna mendapat hak akses yang digunakan untuk keperluan identifikasi pengguna dan diberikan berupa *User-ID*, *Password*, dan *Public Key Infrastructure*

2. Pengguna mempunyai kewajiban :
 - a. Menjaga keamanan atas penggunaan hak akses *Public Key Infrastructure*
 - b. Melakukan pengiriman data dan informasi yang diperlukan untuk proses penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik sesuai dengan proses bisnis yang diatur dalam *Public Key Infrastructure*
 - c. Mengikuti petunjuk pengoperasian sistem penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - d. Menyampaikan laporan kepada *Contact Center* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada kesempatan pertama, dalam hal terjadi permasalahan dalam pengoperasian sistem penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE)
 - e. Menyampaikan pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan mengakses dan menggunakan *Public Key Infrastructure*

USER ID, PASSWORD, DAN PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE

1. Pada halaman login pengguna :
 - a. *User-ID* dan *Password* merupakan kombinasi untuk untai karakter dan angka yang bersifat rahasia yang dapat digunakan untuk membuka akses halaman terbatas dengan melakukan pengisian *User-ID* dan *Password* pada halaman *login* pengguna.
 - b. *Public Key Infrastructure* adalah sebuah kunci yang bersifat unik untuk menjamin data *integrity* dan *non repudiation* pada dokumen yang ditransaksikan atau dikirimkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Pengguna yang telah mendapatkan *User-ID* dan *Password*, wajib menjaga kerahasiaannya.
3. Pengguna wajib mengamankan *User-ID*, *Password*, dan *Public Key Infrastructure* tersebut, antara lain dengan cara:
 - a. Tidak memberitahukan *User-ID*, *Password*, dan *Public Key Infrastructure* kepada pihak lain yang tidak berhak.
 - b. Tidak menyimpan data *Public Key Infrastructure* pada media penyimpanan publik seperti Warung Internet, Komputer Pribadi, USB yang digunakan bersama, dan sebagainya yang dapat mengakibatkan data *Public Key Infrastructure* tersebut dimiliki oleh orang yang tidak berkepentingan.

- c. Berhati - hati dalam menggunakan *User-ID*, *Password*, dan *Public Key Infrastructure* agar tidak diketahui oleh orang lain.
- d. Melakukan penggantian *Password* secara berkala.
4. Kerahasiaan data *User-ID*, *Password*, dan *Public Key Infrastructure* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna dan hanya boleh digunakan oleh Pengguna yang bersangkutan.
5. Apabila *User-ID*, *Password*, dan *Public Key Infrastructure* hilang/dicuri/dipindahtangankan kepada pihak lain, Pengguna harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dilakukan pemblokiran dokumen elektronik.
6. Sebelum diterimanya pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua perintah, transaksi dan komunikasi yang menggunakan *User-ID*, *Password*, dan *Public Key Infrastructure* oleh pihak yang tidak berwenang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna.

PENGGUNAAN DAN PENYALAHGUNAAN *USER-ID*, *PASSWORD*, DAN *PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE*

1. Penggunaan *User-ID*, *Password*, dan *Public Key Infrastructure* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pengguna.
2. Pengguna membebaskan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun Pengguna sendiri sebagai akibat penyalahgunaan *User-ID*, *Password*, dan *Public Key Infrastructure* tersebut.

PENGAKHIRAN HAK AKSES

1. Hak akses terhadap pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) akan berakhir apabila :
 - a. Pengguna mengajukan permohonan pengakhiran hak akses atas penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - b. Terdapat perbedaan data pokok perusahaan antara data yang dikirim dengan data referensi.
 - c. Permintaan secara tertulis dari Pengguna karena adanya dugaan atau diketahuinya penyalahgunaan *User-ID*, *Password* dan *Public Key Infrastructure* oleh pihak yang tidak berwenang.
 - d. Direktorat jenderal Bea dan Cukai menilai adanya penyalahgunaan dalam penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) oleh Pengguna yang berkaitan dengan pelanggaran hukum.

- e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pengakhiran hak akses dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal dilakukan pengakhiran hak akses atas dalam penyampaian pemberitahuan pabean, dokumen cukai dan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengguna.

Yang menyetujui

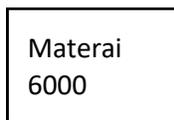
Nama :(1).....

Jabatan :(2).....

Perusahaan :(3).....

NPWP :(4).....

.....(5).....



(.....(6).....)

DIREKTUR JENDERAL

-ttt-

HERU PAMBUDI